Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PERAN ADMINISTRASI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Ageung Putri Aprilia[1]

[1] Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Serang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

Agengputri521@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi berperan penting dalam mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi melalui pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penyusunan nota dinas, pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), pengarsipan dokumen, administrasi *e-purchasing*, serta inventarisasi data pembangunan. Pengelolaan administrasi yang sistematis mendukung kelancaran koordinasi, penyediaan informasi, dan penyusunan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pelaksanaan administrasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya volume dokumen, tuntutan ketelitian, dan perlunya koordinasi yang efektif antarpegawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa administrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci*:* Administrasi Publik; Administrasi Pembangunan; Monitoring dan Evaluasi; Pembangunan Daerah; Pemerintah Daerah

A B S T R A C T

This study aims to analyze the role of administration in supporting the implementation of regional development monitoring and evaluation at the Development Administration Division of the Regional Secretariat of Serang Regency. The study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, documentation, and literature review and were analyzed using qualitative data analysis techniques. The findings indicate that administration plays a significant role in supporting monitoring and evaluation activities through the management of incoming and outgoing correspondence, preparation of official memoranda, issuance of assignment letters, document archiving, e- purchasing administration, and development data inventory. A well-organized administrative system facilitates coordination, provides accurate information, and supports report preparation as the basis for decision-making. However, several challenges remain, including the high volume of administrative documents, the need for accuracy in document management, and effective coordination among employees. The study concludes that administration has a strategic role in improving the effectiveness of regional

*Corresponding author
E-mail addresses: agengputri521@gmail.com

development monitoring and evaluation while supporting the implementation of effective, transparent, and accountable governance.

***Keywords**: Public Administration; Development Administration; Monitoring And Evaluation; Regional Development; Local Government*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang terencana, efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta capaian program sehingga dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah (Dunn, 2018). Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil

Monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan. Hasil penelitian (Tanjung et al., 2018) menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi mampu memberikan informasi mengenai capaian program sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, administrasi memegang peranan penting sebagai pendukung kelancaran proses kerja pemerintahan. Administrasi berfungsi dalam pengelolaan dokumen, penyediaan data, penyusunan laporan, serta koordinasi antarperangkat daerah sehingga informasi yang dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi dapat tersaji secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pengelolaan administrasi yang tertib akan mempermudah proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara normatif, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan data yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum berjalan secara efektif (Ismawati et al., 2023).

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pengelolaan administrasi, penyusunan dokumen, administrasi surat-menyurat, serta penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengendalian pembangunan. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, pelaksanaan administrasi pada unit kerja tersebut telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, masih dijumpai beberapa kendala, seperti tingginya volume dokumen yang harus dikelola, tuntutan ketelitian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

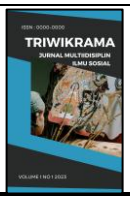

dalam pengelolaan administrasi, serta perlunya koordinasi yang efektif agar setiap proses administrasi dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi dan pengelolaan data yang digunakan (Dewi & Maulana, 2024). Selain itu, (Rihaz & Rusadi, 2025) menyatakan bahwa koordinasi antarperangkat daerah serta keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana administrasi berperan dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan proses administrasi yang diterapkan dalam pengelolaan dokumen dan informasi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan dalam organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Menurut (Waldo, 1948), administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ketatausahaan, tetapi juga sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai unsur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi publik memiliki fungsi strategis dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya, koordinasi, komunikasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, administrasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang saling berkaitan. (Terry, 1968) menjelaskan bahwa administrasi mencakup empat fungsi utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan karena setiap kegiatan administrasi harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, serta diawasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Penerapan fungsi administrasi tersebut juga menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya melalui penyediaan informasi, pengelolaan dokumen, dan koordinasi antarunit kerja.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan. (Dunn, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan. Sementara itu, kegiatan monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

*Corresponding author
E-mail addresses: agengputri521@gmail.com

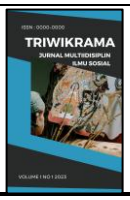

pengawasan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh sistem administrasi yang mampu menyediakan data dan informasi secara akurat, lengkap, serta tepat waktu. Administrasi yang tertib akan memudahkan proses pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, dan koordinasi antarbagian sehingga hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi berperan sebagai pendukung utama yang menjembatani proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa administrasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan. (Akhyary et al., 2024) menjelaskan bahwa kualitas administrasi pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas monitoring dan evaluasi karena tersedianya data yang akurat akan mempermudah proses penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian (Hapsari et al., 2023) juga menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen dan administrasi yang sistematis mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pada instansi pemerintah daerah.

Selain itu, (Dewi & Maulana, 2024) menyatakan bahwa efektivitas monitoring dan evaluasi dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi dan pengelolaan data yang digunakan. Administrasi yang baik memungkinkan tersedianya informasi yang valid sehingga mendukung penyusunan laporan serta pengambilan keputusan secara lebih tepat. Sementara itu,(Hidayah & Sasmita, 2025) mengungkapkan bahwa kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi umumnya berkaitan dengan koordinasi antarunit kerja serta pengelolaan administrasi yang belum optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada efektivitas monitoring dan evaluasi, sistem pelaporan, maupun kendala implementasi pembangunan daerah. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran administrasi sebagai pendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana administrasi berperan dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan melalui pengelolaan dokumen, administrasi surat-menyurat, penyusunan laporan, serta koordinasi administrasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai peran administrasi dalam mendukung monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran administrasi dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan proses administrasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis keterkaitannya dengan konsep administrasi publik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

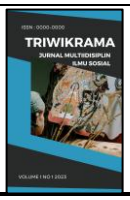

Penelitian dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang selama pelaksanaan kegiatan magang pada bulan Januari hingga Maret 2026. Fokus penelitian adalah peran administrasi dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, yang meliputi pengelolaan dokumen, administrasi surat-menyurat, penyusunan laporan, serta koordinasi administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi selama pelaksanaan magang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap surat masuk, surat keluar, nota dinas, Surat Perintah Tugas (SPT), laporan monitoring dan evaluasi, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, data juga didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses administrasi yang berlangsung pada Bagian Administrasi Pembangunan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah. Adapun studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung analisis hasil penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut (Sugiyono, 2023), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh dianggap jenuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid mengenai peran administrasi dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama pelaksanaan magang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya pada aspek administrasi yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan. Unit kerja ini berfungsi sebagai pendukung administrasi bagi pelaksanaan koordinasi pembangunan melalui pengelolaan surat-menyurat, penyusunan dokumen kedinasan, pengarsipan, penyediaan data, serta fasilitasi administrasi kegiatan monitoring lapangan. Seluruh aktivitas tersebut menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ketatausahaan, tetapi juga menjadi bagian yang mendukung kelancaran proses pengendalian pembangunan daerah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa administrasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjamin tersedianya informasi yang akurat dan terdokumentasi secara sistematis. Setiap surat masuk yang diterima terlebih dahulu dicatat ke dalam buku agenda, kemudian diproses melalui disposisi sebelum diteruskan kepada pejabat atau bagian yang berkepentingan. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan setiap informasi terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan

*Corresponding author
E-mail addresses: agengputri521@gmail.com

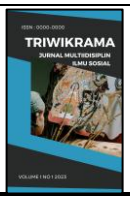

proses koordinasi antarbagian. Demikian pula terhadap surat keluar dan nota dinas yang disusun sesuai tata naskah dinas sehingga komunikasi administratif dapat berlangsung secara tertib. Temuan ini menunjukkan bahwa tertib administrasi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah karena seluruh informasi dapat ditelusuri kembali ketika diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan maupun pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menguatkan temuan (Akhyary et al., 2024) yang menyatakan bahwa kualitas administrasi pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan karena tersedianya informasi yang akurat mempermudah proses evaluasi program.

Selain administrasi surat-menyurat, penyusunan Surat Perintah Tugas (SPT) juga menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan monitoring lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, SPT disusun sebagai dasar penugasan pegawai dalam melaksanakan monitoring terhadap kegiatan pembangunan di berbagai perangkat daerah maupun lokasi proyek. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus dasar legal pelaksanaan tugas. Keberadaan SPT menunjukkan bahwa setiap kegiatan monitoring dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kelembagaan. Dengan demikian, administrasi tidak hanya mendukung aspek dokumentasi, tetapi juga menjamin tertibnya pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan.

Pengelolaan dokumen menjadi aspek lain yang mendukung efektivitas monitoring dan evaluasi. Seluruh dokumen hasil monitoring, laporan kegiatan, surat, serta arsip administrasi disimpan secara sistematis sehingga mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Pengarsipan yang baik mempermudah penyusunan laporan perkembangan pembangunan dan menjadi sumber informasi dalam proses evaluasi program. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Hapsari et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan dokumen secara sistematis berpengaruh terhadap efektivitas monitoring dan evaluasi pada instansi pemerintah karena mendukung tersedianya informasi yang lengkap dan mudah diakses.

Selama pelaksanaan magang, administrasi juga mendukung kegiatan *e-purchasing* dan inventarisasi pembangunan. Administrasi *e-purchasing* dilakukan melalui pengelolaan dokumen pengadaan sesuai prosedur yang berlaku sehingga proses administrasi pengadaan dapat berlangsung secara tertib. Sementara itu, kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mendokumentasikan data pembangunan sebagai bahan administrasi dan pelaporan. Kedua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa administrasi berperan dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan dokumen yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

Meskipun sistem administrasi telah berjalan dengan baik, hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Tingginya volume dokumen yang harus dikelola menuntut ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun pengarsipan. Selain itu, koordinasi antarpegawai menjadi faktor penting karena setiap dokumen harus diproses sesuai alur administrasi yang telah ditetapkan. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi, proses administrasi dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan monitoring maupun penyusunan laporan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hidayah & Sasmita, 2025) yang menyebutkan bahwa koordinasi antarunit kerja serta pengelolaan administrasi merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

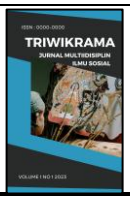

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Administrasi tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ketatausahaan, tetapi juga menjadi sistem pendukung yang menjamin kelancaran koordinasi, pengelolaan informasi, penyediaan dokumen, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Temuan ini memperlihatkan bahwa administrasi yang tertib dan sistematis menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah sehingga mampu menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penyusunan nota dinas, pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), pengarsipan dokumen, administrasi *e-purchasing*, serta inventarisasi data pembangunan. Pengelolaan administrasi yang dilakukan secara tertib dan sistematis mendukung kelancaran koordinasi antarbagian, penyediaan informasi yang akurat, serta penyusunan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingginya volume dokumen yang harus dikelola, tuntutan ketelitian dalam pengelolaan administrasi, dan pentingnya koordinasi yang efektif antarpegawai. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diminimalkan melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang baik, serta penerapan prosedur administrasi secara konsisten. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai pentingnya fungsi administrasi sebagai pendukung efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas objek penelitian pada perangkat daerah lain atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed methods*, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh administrasi terhadap efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Akhyary, E., Rivai, N. I., Basalamah, R. H., & Azizi, O. R. (2024). EFEKTIVITAS PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *11*(November 2023), 72–78.

Dewi, S. H. F., & Maulana, I. R. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi Monitoring (SIPENATAJAM) Pada BAPPEDA Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi (JIKOMTI)*, *1*(1).

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge. https://books.google.co.id/books?id=Tq_XAQAACAAJ

*Corresponding author
E-mail addresses: agengputri521@gmail.com

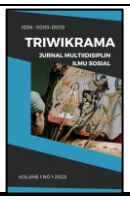

Hapsari, N. W., TL, Wi. E., & Gedeona, H. T. (2023). OPTIMALISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Optimization Of Monitoring And Evaluation Activities In The Regional Research And Development Agency Of West Java Province. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, *04*(1), 19–25.

Hidayah, R. U., & Sasmita, S. (2025). PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI SUMATERA BARAT OLEH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH SUMBAR. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, *11*(2), 566–580.

Ismawati, D., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Implementation of Permendagri Number 86 of 2017 in the Preparation of Regional Development Plans in the Tulungagung District. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, *5*(1), 58–68. https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502

Rihaz, A. P., & Rusadi, S. (2025). Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan Dan Pengembangan Kabupaten Di Provinsi Riau. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan (JMP)*, *2*(4), 646–653.

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (5th ed.). Alfabeta.

Tanjung, L. N., Muarin, D., & Purnomo, E. P. (2018). MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017. *Jurnal Agregasi*, *6*(1), 1–125.

Terry, G. R. (1968). *Principles of Management* (5th ed.). Richard D. Irwin. https://books.google.co.id/books?id=7TiyAAAAIAAJ

Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Ronald Press Company.